



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Peternakan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Peternakan LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja



suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Peternakan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Peternakan merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN

Pembentukan Dinas Peternakan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 85 Tahun 2016



tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan, Tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Dinas Peternakan.

Dinas Peternakan Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan bahwa Dinas Peternakan Kabupaten Bone merupakan unsur Pelaksana Pemerintahan Kabupaten di Bidang peternakan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bone melalui Sekretariat Daerah. Dinas Peternakan Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang peternakan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

b. Fungsi Dinas Peternakan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan. Kabupaten Bone sebagai berikut :

1) Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian khususnya sub urusan peternakan;
- b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peternakan dan pengawasan terhadap pengembangan, pemanfaatan dan peredaran hasil-hasil peternakan berwawasan agribisnis;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan;



- f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang peternakan daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :

- a. penyusun rencana program dan anggaran belanja Dinas Peternakan;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas pada Dinas Peternakan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkup peternakan;
- c. penghimpun bahan untuk penyusunan peraturan daerah di bidang peternakan dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. penyusun bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusun data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Dinas;
- f. pelaksana urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

3) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana peternakan;
- b. penyediaan dukungan insfrastuktur peternakan;
- c. pengembangan potensi dan pengolahan lahan, air dan alsin peternakan;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan alat dan mesin peternakan;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
- f. pemberian fasilitas investasi peternakan;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana peternakan; dan
- h. penyediaan alat dan mesin peternakan;



- i. pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin peternakan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan program di bidang pembibitan dan produksi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pembibitan di bidang peternakan;
- c. pelaksanaan penataan distribusi dan redistribusi ternak;
- d. pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan;
- e. pelaksanaan pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak;
- f. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
- g. pelaksanaan pembinaan penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia;
- h. pelaksanaan bimbingan registrasi dan redistribusi ternak;
- i. pelaksanaan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan penyebaran ternak;
- j. pelaksanaan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak;
- k. pelaksanaan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. pelaksanaan pengamatan, pengendalian dan identifikasi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan hewan;
- d. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan hewan veteriner;
- e. pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah/ kasus;
- g. pelaksanaan penetapan dan pengawasan kawasan karantina hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;



- i. pelaksanaan bimbingan pengawasan dan peredaran di tingkat depo sediaan biologik, farmasetik dan premix;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala UPTD Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun kebijakan/rencana kegiatan dibidang pembibitan ternak sapi dan pakan/ hijauan makanan ternak;
- b. penerapan kebijakan teknis pembibitan ternak sapi dan produksi pakan/hijauan makanan ternak;
- c. pemberian pelayanan dibidang pengadaan/pendistribusian dan pemasaran;
- d. pembinaan/pelatihan teknis dibidang pembibitan ternak sapi dan pakan/hijauan makanan ternak;
- e. melaksanakan pengkajian teknis dibidang pembibitan/pengembangan ternak sapi dan pakan/hijauan makanan ternak;
- f. melaksanakan recording/pencatatan, monitoring dan evaluasi/pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- g. melaksanakan pemeliharaan ternak sapi dan hijauan makanan ternak, yang ada dalam lingkungan lokasi UPTD IPR;
- h. melaksanakan perawatan/pencegahan, pengobatan penyakit ternak dan reproduksi ternak;
- i. melaksanakan perawatan, penanaman dan pemupukan hijauan makanan ternak;
- j. melaksanakan pengelolaan pemanfaatan lahan UPTD IPR;
- k. melaksanakan pengolahan limbah ternak menjadi pupuk bokasi dan biogas;
- l. melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pencatatan pemasaran bibit ternak dan pakan/hijauan makanan ternak;
- m. melaksanakan pemeriksaan umum perkembangan ternak sapi;
- n. melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana/prasarana UPTD IPR;



- o. melaksanakan urusan Tata Usaha UPTD IPR;
- p. menjaga keamanan lingkungan UPTD;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.

7) Kepala UPTD Pembibitan Ternak Kambing mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun kebijakan/rencana kegiatan dibidang pembibitan ternak kambing, Ternak Unggas dan Holding Ground;
- b. penerapan kebijakan teknis pembibitan ternak Kambing, Ternak Unggas dan Holding Ground;
- c. pemberian pelayanan dibidang pengadaan/pendistribusian dan pemasaran;
- d. pembinaan/pelatihan dibidang pembibitan Ternak Kambing dan Ternak Unggas;
- e. melaksanakan pengkajian teknis dibidang pembibitan/pengembangan Ternak Kambing dan Ternak Unggas;
- f. melaksanakan recording/pencatatan, monitoring dan evaluasi/pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pemeliharaan Ternak Kambing dan Ternak Unggas;
- h. Melaksanakan perawatan/pencegahan, pengobatan penyakit ternak dan reproduksi ternak;
- i. Melaksanakan perawatan, penanaman dan pemupukan hijauan makanan ternak yang ada dalam lingkungan UPTD;
- j. Melaksanakan pengelolaan pemanfaatan lahan UPTD;
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kandang ternak penampungan Holding Ground;
- l. Melaksanakan pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk bokasi dan biogas;
- m. Menjaga keamanan lingkungan UPTD;
- n. Melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana/prasarana UPTD;
- o. Melaksankan urusan tata usaha UPTD;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.



c. Struktur Organisasi

Dinas Peternakan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Bedasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Bone terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Suba Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan, membawahi :
 - a. Seksi Lahan air dan Alat Mesin;
 - b. Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - c. Seksi Pakan.
4. Bidang Pembibitan dan Produksi, membawahi :
 - a. Seksi Ternak Besar;
 - b. Seksi Ternak Kecil;
 - c. Seksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak.
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan;
 - c. Seksi Obat Hewan.
6. Bidang pengembangan Usaha dan Penyuluhan, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil;
 - c. Seksi Promosi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

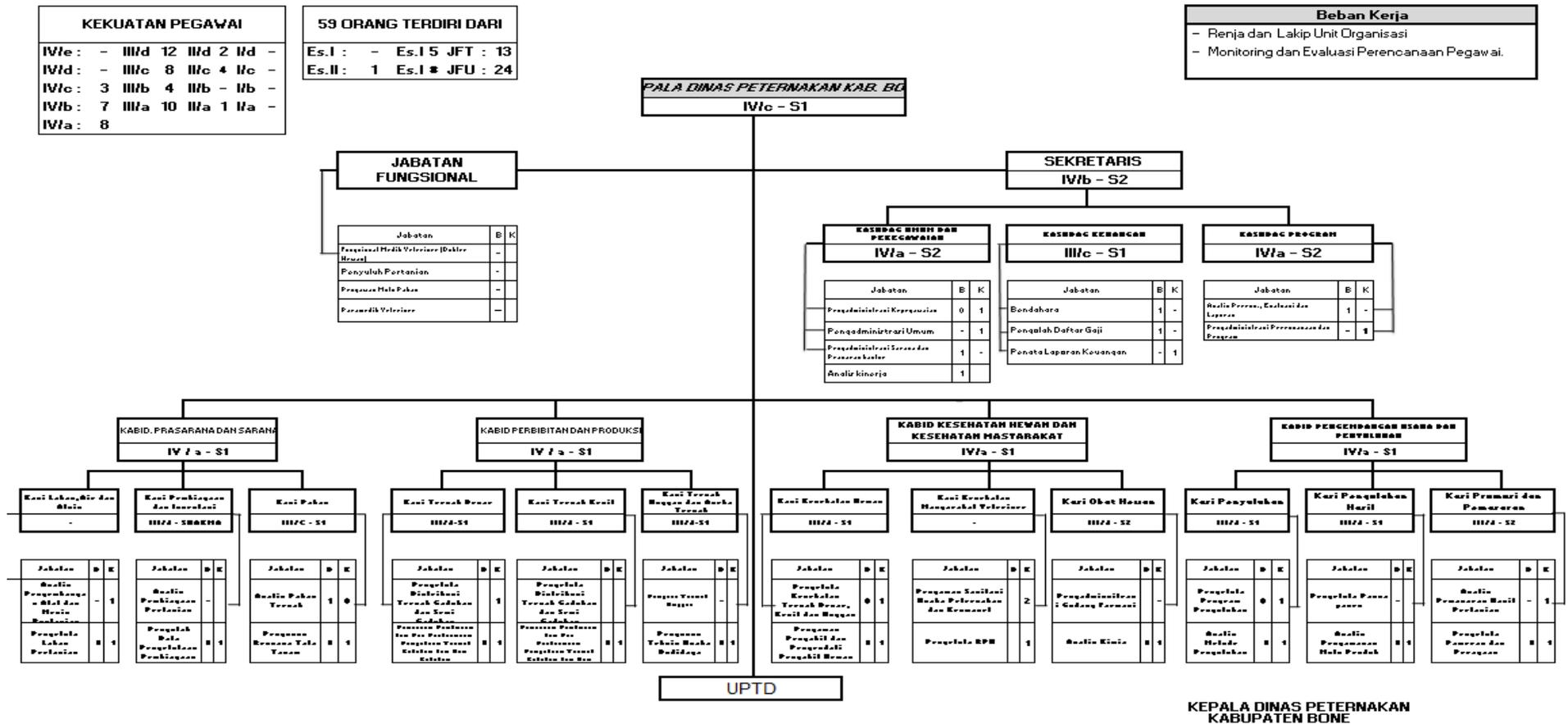


Gambar 1 Struktur Organisasi

DINAS PETERNAKAN

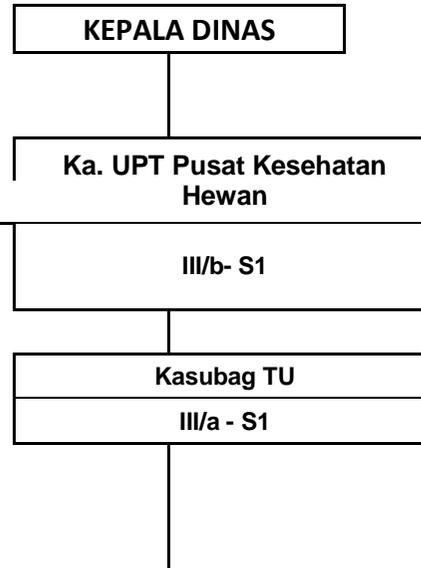
NAMA INSTANSI : DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE

PETA JABATAN DINAS PETERNAKAN





**PETA JABATAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE**

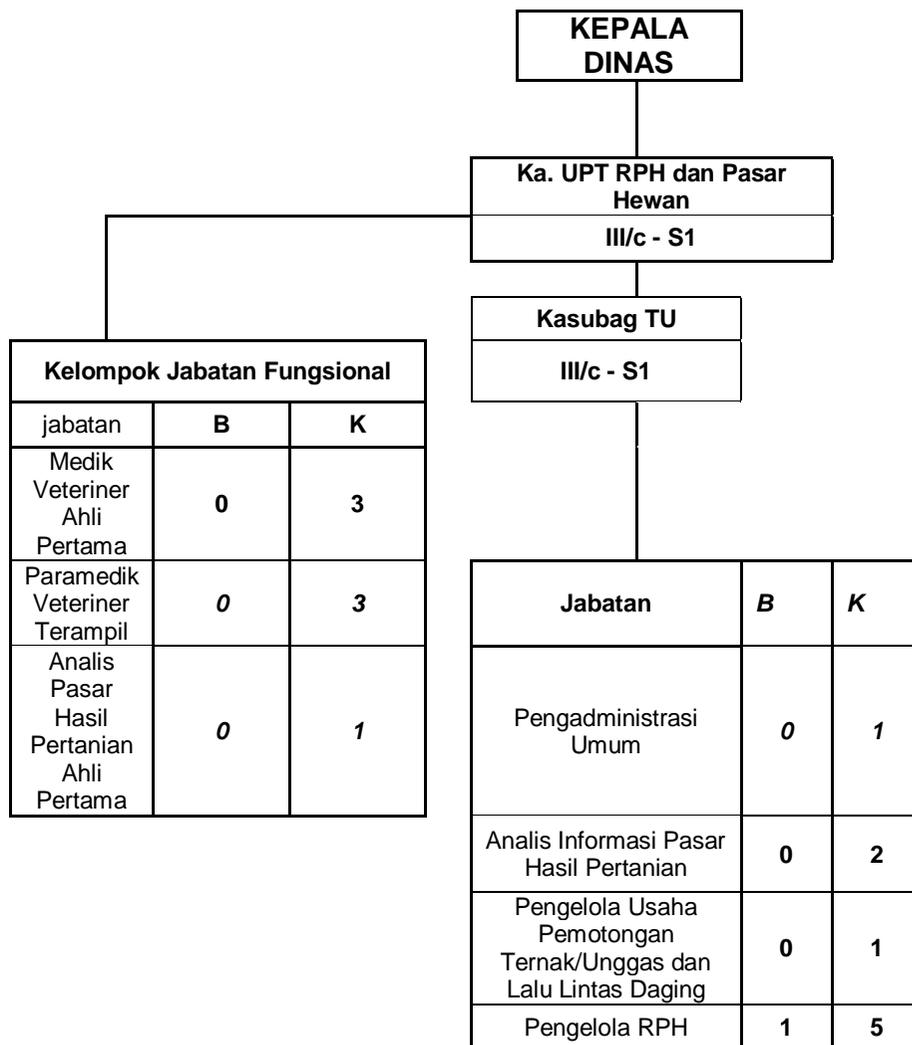


Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	B	K
Medik Veteriner Ahli Pertama	0	8
Paramedik Veteriner Terampil	0	8

Jabatan	B	K
Pengadministrasi Umum	-	1
Perawat Ternak	4	6
Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	-	6
Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	-	6
Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	-	6
Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesmavet	-	6

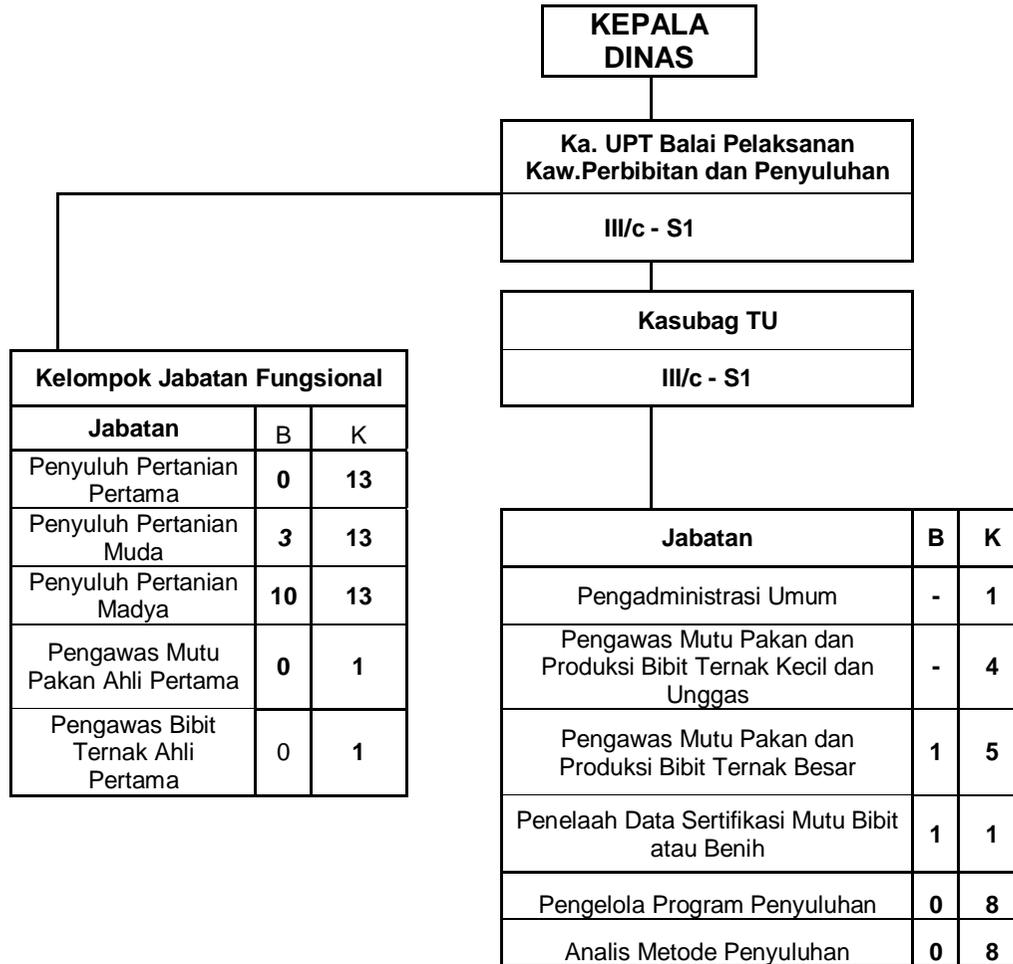


**PETA JABATAN UPT RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE**





**PETA JABATAN UPT BALAI PELAKSANA KAWASAN PERBIBITAN DAN PENYULUHAN
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE**

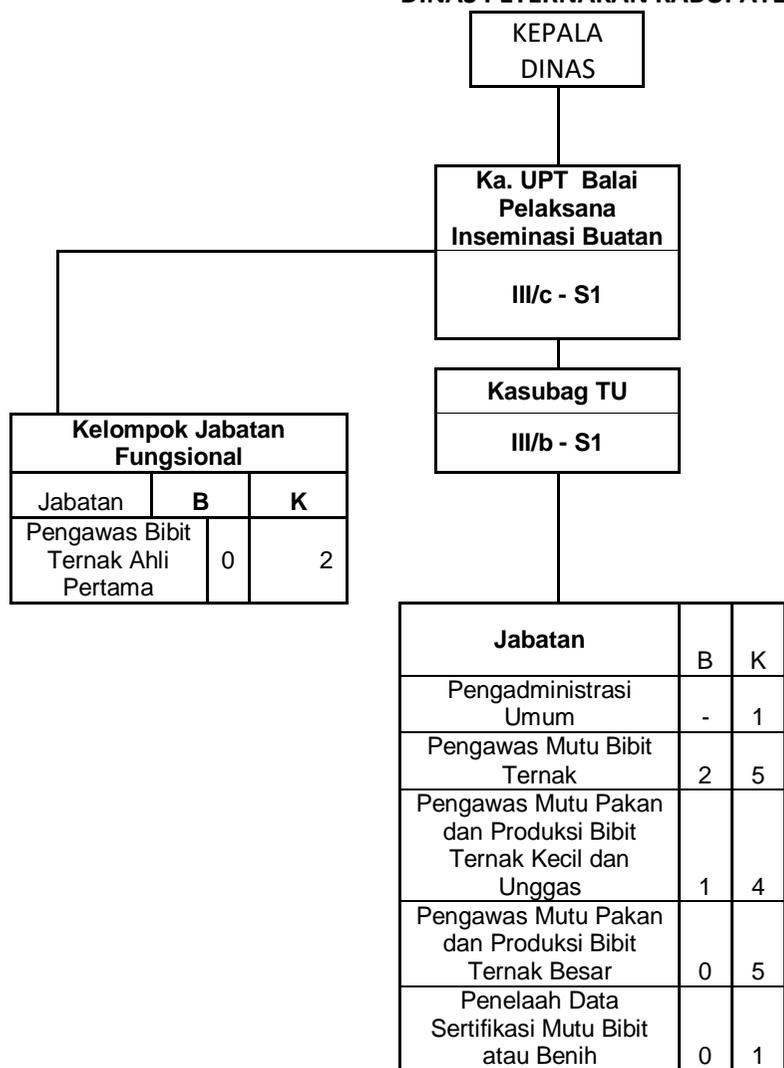


Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	B	K
Penyuluh Pertanian Pertama	0	13
Penyuluh Pertanian Muda	3	13
Penyuluh Pertanian Madya	10	13
Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	0	1
Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	0	1

Jabatan	B	K
Pengadministrasi Umum	-	1
Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	-	4
Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	1	5
Penelaah Data Sertifikasi Mutu Bibit atau Benih	1	1
Pengelola Program Penyuluhan	0	8
Analisis Metode Penyuluhan	0	8



**PETA JABATAN UPT BALAI PELAKSANA INSEMINASI BUATAN
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE**

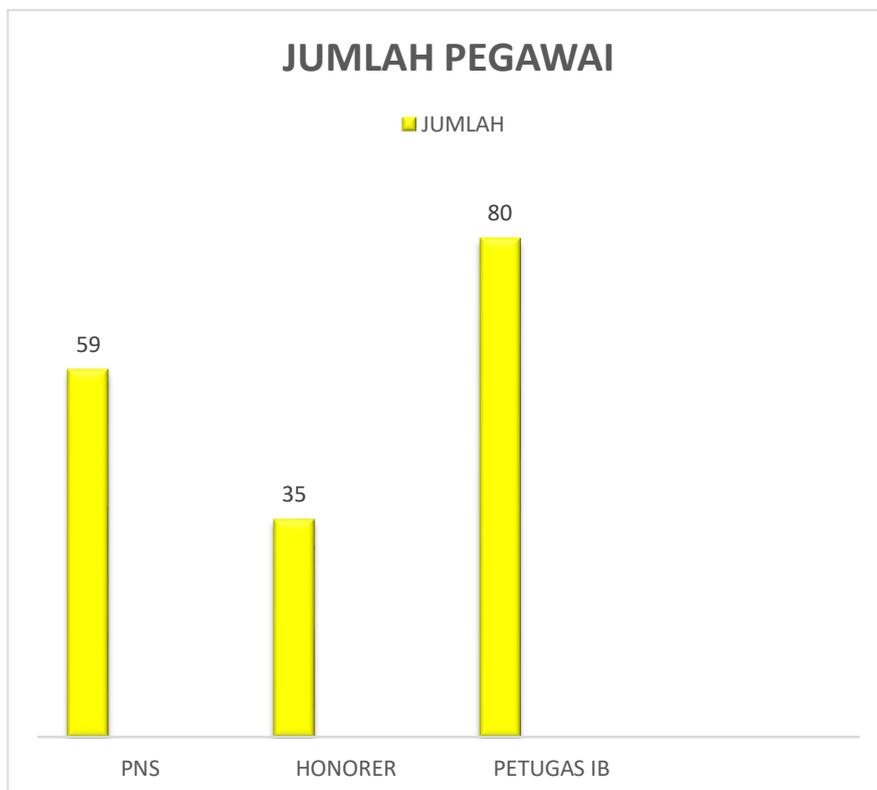




Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Dinas Peternakan sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Bone maka dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Tahun 2018 di dukung oleh sejumlah pegawai terdiri dari :

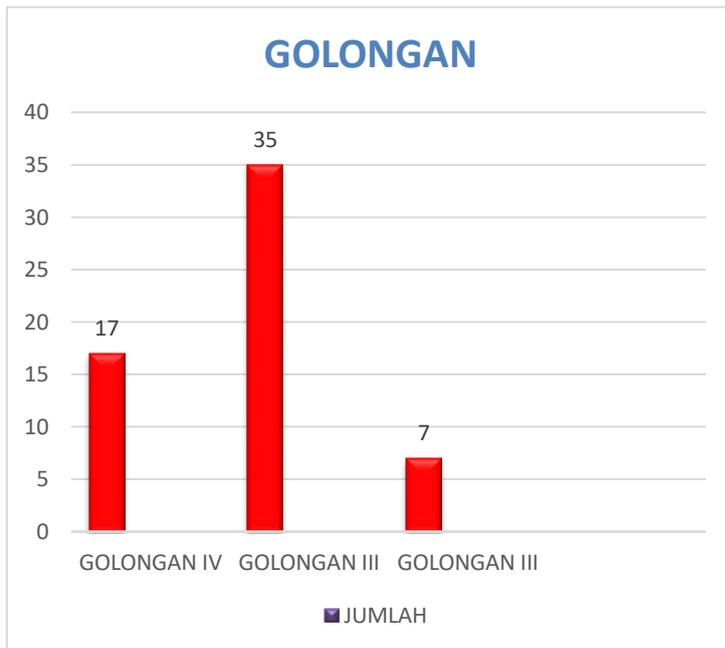
1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 59 orang;
2. Tenaga Kerja/ Upah bulanan / honorer sebanyak 35 orang;
3. Petugas Inseminasi Buatan (insiminator) swadaya sebanyak 80 orang.





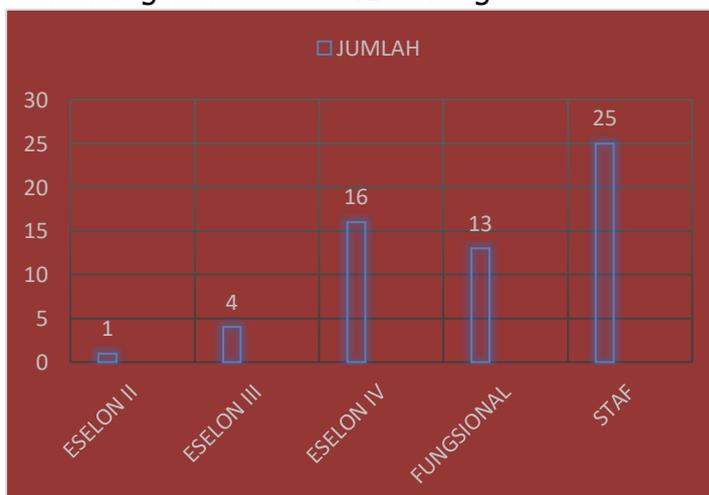
Berdasarkan golongan ruang, dari 59 PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2018 terdiri atas :

1. Golongan IV : 17 orang
2. Golongan III : 35 orang
3. Golongan II : 7 orang



Berdasarkan jabatan, sejumlah 59 PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2018 terdiri atas :

1. Eselon II : 1 orang
2. Eselon III : 4 orang
3. Eselon IV : 16 orang
4. Fungsional : 13 orang

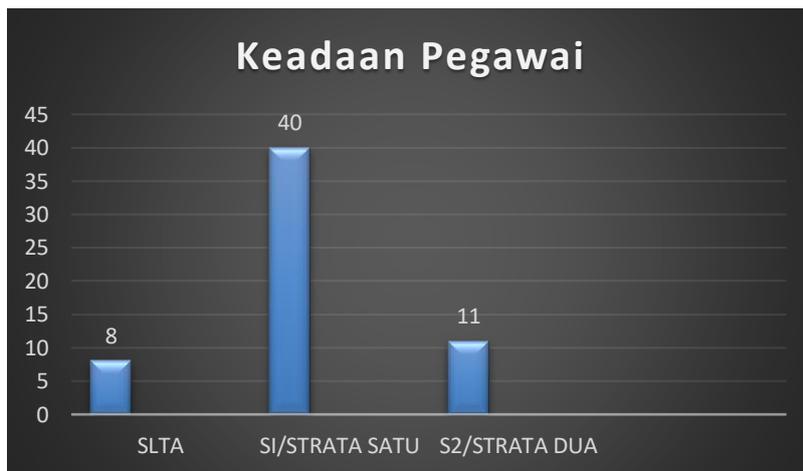




Keadaan Pegawai berdasarkan pendidikan :

- Pendidikan SLTA sebanyak 8 orang
- Pendidikan S1/ Strata 1 sebanyak 40 orang
- Pendidikan S2/ Strata 2 sebanyak 11 orang

Dengan komposisi jenis kelamin laki-laki sebanyak 38 dan perempuan sebanyak 38 orang, berada di Dinas Peternakan 33 orang dan berada di Kecamatan-kecamatan sebagai tenaga teknis peternakan 26 orang.



1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas peternakan yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan sebagai berikut:

1. Masih adanya ancaman penyakit zoonosis di Kabupaten Bone
2. Pelaksanaan kaji terap belum memberikan kesejahteraan bagi peternak.
3. Masih rendahnya kualitas SDM peternak di Kabupaten Bone mengenai mekanisme peternakan yang baik.
4. Terbatasnya petugas peternakan dalam menjangkau luas Wilayah
5. Meningkatnya pematangan betina produktif
6. Belum memprioritaskan pelibatan pemberdayaan perempuan dan peternak miskin pada pengembangan sumber daya manusia dan data pilah



7. Pembangunan kawasan peternakan yang berwawasan agribisnis dan agroindustri belum di rencanakan berdasarkan pendekatan politis daerah pemilihan untuk mengintegrasikan pendekatan partisipatif.

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas peternakan Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Pembangunan kawasan peternakan yang berwawasan agribisnis dan agroindustri belum di rencanakan berdasarkan pendekatan politis daerah pemilihan untuk mengintegrasikan pendekatan partisipatif Dan memprioritaskan pelibatan pemberdayaan perempuan dan peternak miskin pada pengembangan sumber daya manusia.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas peternakan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 VISI :

Dilihat dari kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, relevansi kinerja sangat erat kaitannya dengan visi Bupati yaitu Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.

Sehat, Dinas Peternakan memiliki perhatian yang kuat terhadap kondisi kesehatan ternak yang ada di Kabupaten Bone. Hal ini dilandasi oleh persepsi bahwa konsumsi hasil peternakan yang berkualitas dan sehat akan mampu memberikan sumbangan positif terhadap tingkat kesehatan masyarakat. selain itu, dengan adanya upaya pencegahan penyakit hewan (zoonosis), diharapkan terjadinya penularan zoonosis kepada manusia dapat diminimalisir.

Cerdas, Dinas Peternakan Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi petani ternak dalam rangka meningkatkan hasil peternakan yang dimiliki. Kondisi demikian, akan memberikan sebuah kontribusi positif terhadap keberdayaan masyarakat sehingga secara langsung mendukung terhadap visi bupati untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Bone menjadi cerdas.

Sejahtera, implementasi dari pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, nantinya diharapkan akan mampu untuk memberikan kontribusi positif terhadap hasil peternakan yang secara langsung juga akan memberikan hasil positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 MISI :



Dinas Peternakan juga memiliki kontribusi terhadap capaian misi bupati, yaitu pada misi ketiga **“mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan”**. Gambaran pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan adalah dengan mengembangkan ekonomi yang berbasis kerakyatan, yaitu penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan peternakan secara optimal.

2.1.3 TUJUAN DAN INDKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan keahlian peternak dalam proses produksi dan pemasaran hasil peternakan.

Indikator :

1. Besarnya rata-rata jumlah pendapatan peternak.
2. Besarnya Permintaan Ternak.
3. Besarnya Permintaan Daging.
4. Besarnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah.
5. Jumlah Populasi Sapi
6. Jumlah Populasi Kerbau
7. Jumlah Populasi Kuda.
8. Jumlah Populasi Kambing
9. Jumlah Populasi Itik.
10. Jumlah Populasi Ayam Buras.
11. Jumlah Populasi Ayam Petelur.
12. Jumlah Populasi Ayam Pedaging.
13. Jumlah Kasus Penyakit Ternak.
14. Jumlah Ternak yang diberi vaksin
15. Jumlah Kasus Penemuan Penyakit pada hewan ternak

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan keahlian peternak dalam prosers produksi peternakan	Besarnya rata-rata jumlah penadapatan peternak	Rp	8.000.000	13.000.000
	Besarnya Permintaan Ternak	Ekor	25.798	34.101
	Besarnya permintaan Daging	Kg	6.352	5.540
	<i>Besarnya Pendapatan asli daerah</i>	Rp	700.000.000	1.100.000.000
	Jumlah Populasi Sapi Jumlah Populasi Sapi	Ekor	307.435	536.664
	Jumlah Populasi kerbau	Ekor	3.841	5.036
	Jumlah Populasi kambing	Ekor	22.984	30.951
	Jumlah Populasi Itik	Ekor	188.269	351.840
	Jumlah Populasi Ayam buras	Ekor	2.290.682	3.993.000
	Jumlah Populasi Ayam Petelur	Ekor	137.101	243.387
	Jumlah Populasi ayam Pedaging	Ekor	136.324	575.460
	Jumlah Populasi Kuda	Ekor	97.96	13.963
	<i>Jumlah Kasus penyakit ternak</i>	Ekor	5.617	1.124
	<i>Jumlah ternak yang di beri Vaksin</i>	Ekor	61.326	96.821
	<i>Jumlah ternak yang di beri Vaksin</i>	Ekor	76	12



Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan keterampilan peternak dalam proses produksi dan pemasaran hasil peternakan

Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas petani peternak dalam teknik budidaya dan pemasaran hasil peternakan.
2. Meningkatnya pemasaran hewan ternak dan hasil ikutannya.
3. Meningkatnya Populasi ternak dan hasil ikutannya.
4. Berkurangnya kasus penyakit ternak zoonosis dan penyakit lainnya.



Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkanknya Kapasitas Petani peternak dalam teknik budidaya dab pemasaran hasil peternakan	Besarnya rata-rata jumlah penadapatan peternak	Rp	8.000.000	13.000.000
Meningkatnya pemasaran hewan ternak, dan hasil ikutannya	Besarnya Permintaan Ternak	ekor	25.798	34.101
	Besarnya permintaan Daging	kg	6.352	5.540
	<i>Besarnya Pendapatan asli daerah</i>	Rp	700.000.000	1.100.000.000
Meningkatnya Populasi ternak dan hasil peternakan	Jumlah Populasi Sapi Jumlah Populasi Sapi	ekor	307.435	536.664
	Jumlah Populasi kerbau	ekor	3.841	5.036
	Jumlah Populasi kambing	ekor	22.984	30.951
	Jumlah Populasi Itik	ekor	188.269	351.840
	Jumlah Populasi Ayam buras	ekor	2.290.682	3.993.000
	Jumlah Populasi Ayam Petelur	ekor	137.101	243.387
	Jumlah Populasi ayam Pedaging	ekor	136.324	575.460
	Jumlah Populasi Kuda	ekor	97.96	13.963
	Berkurangnya Kasus Penyakit	<i>Jumlah Kasus penyakit ternak</i>	ekor	5.617
<i>Jumlah ternak yang di beri Vaksin</i>		ekor	61.326	96.821
<i>Jumlah ternak yang di beri Vaksin</i>		ekor	76	12



2. 1.4 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kapasitas Petani Peternak dalam tehnik budidaya dan pemasaran hasil peternakan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya Pemasaran hewan ternak,dan hasil ikutannya	Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya Populasi Ternak dan Hasil Peternakan	Program Peningkatan hasil Produksi Peternakan
Berkurangnya Kasus Penyakit Ternak zoonosis dan Penyakit Lainnya.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Peternakan telah menetapkan PK sebagai berikut:



Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Kapasitas Petani Peternak dalam tehnik budidaya dan pemasaran hasil peternakan	Besarnya rata-rata jumlah pendapatan peternak	Rp.	13.000.000
Meningkatnya Pemasaran hewan ternak,dan hasil ikutannya	Besarnya permintaan ternak	ekor	34.101
	Besarnya permintaan daging	ton	5.540
	Besarnya pendapatan asli daerah	Rp.	1.100.000
Meningkatnya Populasi Ternak dan Hasil Peternakan	Jumlah populasi sapi	ekor	536.664
	Jumlah populasi kerbau	ekor	5.036
	Jumlah populasi kuda	ekor	30.951
	Jumlah populasi kambing	ekor	351.840
	Jumlah populasi itik	ekor	3.993.000
	Jumlah populasi ayam buras	ekor	243.387
	Jumlah populasi ayam petelur	ekor	575.460
	Jumlah populasi ayam pedaging	ekor	13.963
Berkurangnya Kasus Penyakit Ternak zoonosis dan Penyakit Lainnya.	Jumlah kasus penyakit ternak	Jenis	1.124
	Jumlah ternak yang diberikan vaksin	ekor	96.821
	Jumlah kasus penemuan jenis penyakit pada hewan ternak	Kasus	12



2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Peternakan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU Disnak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya pemasaran hewan ternak dan hasil ikutannya	Besarnya Pendapatan Asli Daerah	Rp.	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja PAD}}{\text{Jumlah Target Kinerja PAD}} \times 100\%$	laporan ahunan
Meningkatnya Populasi Ternak dan Hasil Peternakan	Jumlah Populasi ternak sapi	Ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018}-\text{Jumlah target kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target kinerja 2018}} \times 100\%$	laporan ahunan
	Jumlah Populasi Ternak Kerbau	Ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018}-\text{Jumlah target kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target kinerja 2018}} \times 100\%$	laporan ahunan
	Jumlah Populasi Ternak Kuda	Ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018}-\text{Jumlah target kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target kinerja 2018}} \times 100\%$	laporan ahunan
	Jumlah Populasi Ternak Kambing	Ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018}-\text{Jumlah target kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target kinerja 2018}} \times 100\%$	laporan ahunan
	Jumlah Populasi Ayam Buras	Ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018}-\text{Jumlah target kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target kinerja 2018}} \times 100\%$	laporan ahunan
	Jumlah Populasi Ayam pedaging	Ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018}-\text{Jumlah target kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target kinerja 2018}} \times 100\%$	laporan ahunan
	Jumlah Populasi Ayam petelur	Ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018}-\text{Jumlah target kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target kinerja 2018}} \times 100\%$	laporan ahunan
	Jumlah Populasi itik	Ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018}-\text{Jumlah target kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target kinerja 2018}} \times 100\%$	laporan ahunan



2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.8.384.064.421.- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Belanja Dinas Peternakan TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.234.064.421	38,57
2	Belanja Langsung	5.150.000.000	61,43
Jumlah		8.384.064.421	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE ANGGARAN
1. Meningkatnya Kapasitas petani peternak dalam teknik budidaya dan hasil peternakan	Besarnya Rata-rata jumlah pendapatan peternak	Peningkatan kesejahteraan Petani.	a. Pembinaan Petani dan Pelaku Agribisnis	315.995.000.-	6,13
			b. Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	31.200.000,-	0,60
2. Meningkatnya Pemasaran hewan ternak dan hasil ikutannya	Besarnya Permintaan Peternak	Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan Pengelolaan dan pemasaran produksi hasil peternakan	154.624.800,-	3,00
	Besarnya Permintaan Daging	Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan			



	Besarnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan	a. Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan b. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	372.025.000 148.799.900.-	7,22 2,88
3. Meningkatnya populasi ternak dan hasil peternakan	Jumlah populasi sapi	Peningkatan Hasil Produksi peternakan	a. Pembibitan dan Perawatan Ternak b. Peningkatan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan	112.270.000,- 188.149.850,-	2,18 3,65
	Jumlah populasi kerbau	Peningkatan Hasil Produksi peternakan	Pengembangan Agribisnis Peternakan	1.310.779.000,-	25,45
	Jumlah populasi Kuda	Peningkatan Hasil Produksi peternakan	Pengembangan Agribisnis Peternakan		
	Jumlah populasi kambing	Peningkatan Hasil Produksi peternakan	Pengembangan Agribisnis Peternakan		
	Jumlah populasi itik	Peningkatan Hasil Produksi peternakan	Pengembangan Agribisnis Peternakan		
	Jumlah populasi ayam buras	Peningkatan Hasil Produksi peternakan	Pengembangan Agribisnis Peternakan		
	Jumlah populasi ayam petelur	Peningkatan Hasil Produksi peternakan	Pengembangan Agribisnis Peternakan		
	Jumlah populasi ayam pedaging	Peningkatan Hasil Produksi peternakan	Pengembangan Agribisnis Peternakan		
4. Berkurangnya kasus penyakit ternak zoonosis dan penyakit lainnya	Jumlah Kasus penyakit ternak	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak	318.245.000.-	6,17
	Jumlah Ternak yang divaksin	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak	318.245.000.-	6,17
	Jumlah kasus penemuan jenis penyakit pada hewan ternak	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak		
5. Meningkatnya Kinerja Aparatur	Telaksananya Pelayanan Prima	Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Peny. Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	179.500.000,-	3,48
			b. Pey. Jasa Peralatan dan Perleng. Kantor	1.390.000,-	0,026
			c. Peny. Jasa Adm. Keuangan	137.924.000,-	2,67
			d. Peny. Bahan Bacaan dan	15.000.000,-	0,29



			Peraturan Perundang-undangan. e. Rapat-rapat Koord. Dan Konsultasi dalam dan luar daerah f. Pelaksanaan Adm. Perkantoran	284.250.800,- 87.990.550,-	5,51 1,70
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	a. Peng. Peralatan Gedung Kantor b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor c. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/operasional d. Pemeliharaan rutin/ rutin Perlengkapan Gedung Kantor	33.100.000,- 1.020.860.000,- 79.185.000,- 10.000.000,-	0,64 19,82 1,53 0,19
	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelak. Rencana Pembangunan Daerah	50.000.000,- 298.771.100,-	0,97 5,80
TOTAL ANGGARAN				5.150.000.000,-	100,00

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp.5.150.000.000.- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan besaran 25,45%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor yaitu sebesar 19,82%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Pemeliharaan rutin /berkalaPerlengkapan Gedung Kantor sebesar 0,19% dari total anggaran belanja langsung.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA REALISASI KINERJA	PENILAIAN
1	>100 %	Baik Sekali	
2	76 % ≤ 100%	Baik	
3	66 % ≤ 75 %	Cukup	
4	51 % ≤ 65 %	Kurang	
5	≤ 50%	Sangat Kurang	

Secara umum Dinas Peternakan Kabupaten Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 4 (empat) sasaran dengan 15 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 1 indikator kinerja, sasaran 2 terdapat 3 indikator kinerja, sasaran 3 terdapat 8 indikator kinerja, sasaran 4 terdapat 3 indikator kinerja.



Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya kapasitas petani peternak dalam teknik budidaya pemasaran hasil peternakan	1	BS = C =	B = 1 K = SK =
2.	Meningkatnya Pemasaran hewan ternak dan hasil ikutannya	3	BS = C =	B = 3 K = SK =
3.	Meningkatnya Populasi ternak dan hasil peternakan	8	BS = 7 C =	B = 1 K = SK =
4.	Berkurangnya kasus penyakit ternak zoonosis dan penyakit lainnya.	3	BS = C =	B = 3 K = SK =
	JUMLAH	15	BS = 7 C =	B = 8 K = SK =

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Dinas Peternakan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Pemasaran Hewan Ternak dan Hasil Ikutannya	Besarnya pendapatan asli daerah	1.250.000.000	1.218.755.000	97,50
2.	Meningkatnya Populasi ternak dan hasil peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi	407.006	422.059	103,69
		Jumlah Populasi Ternak Kerbau	3.860	5.958	154,35
		Jumlah Populasi Ternak Kuda	12.117	12.820	105,80
		Jumlah Populasi Ternak Kambing	35.240	35.693	101,28
		Jumlah Populasi Ayam Buras	4.947.108	4.976.263	100,58
		Jumlah Populasi Ayam Pedaging	219.550	1.606.452	279,15
		Jumlah Populasi Ayam Petelur	221.623	253.059	114,18
		Jumlah Populasi Itik	300.203	260.409	86,74

Dari 2 (dua) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Peternakan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:



Tabel 3.4
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	97,50
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah	1	
Sasaran 2			
1.	Baik Sekali	7	136.95
2.	Baik	1	86.74
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah	8	

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran dengan 9 indikator kinerja, diketahui bahwa 7 indikator sasaran atau 136,95% Baik Sekali, 2 indikator sasaran atau 97,50% Baik, 0 indikator sasaran atau 0% cukup, 0 indikator sasaran atau 0% kurang, dan 0 indikator sasaran atau 0% sangat kurang.

3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Peternakan Tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Dinas Peternakan dapat dijelaskan melalui



uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemasaran Hewan Ternak dan Hasil Ikutannya

a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 1*

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemasaran Hewan Ternak dan Hasil Ikutannya

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Besarnya Pendapatan Asli Daerah	1.250.000.000	1.218.755.000	97,50

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Besarnya Pendapatan Asli Daerah, dengan capaian kurang dari target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai Rp.1.218.755.000,- dari target Rp.1.250.000.000,- dengan persentase 97,50%, Capaian ini dikategorikan Baik.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya dan target akhir renstra Sasaran 1

Tabel 3.6. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Besarnya Pendapatan Asli Daerah	1.114.193.500	1.235.066.000	1.218.755.000

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 1.218.755.000,- dari target Rp.1.250.000.000, mengalami penurunan sebesar 1,32%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 10,84% dari Tahun 2016. Untuk capaian tahun 2018 merupakan capaian akhir renstra, sehingga perbandingan perbandingan tergambar pada capaian tahun ini.



c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target pada Indikator utama 1 Pendapatan Asli daerah karena adanya perubahan Peraturan yang terjadi di provinsi Gorontalo dan daerah lain yang dalam perjanjian kerja sama (MOU) pengadaan ternak sapi dengan Kabupaten Bone mengalami penurunan. Sehingga menyebabkan tidak tercapainya realisasi MoU pengadaan ternak sapi.

Solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu : melakukan diplomasi antara Pemerintah Kabupaten Bone dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dapat melanjutkan perjanjian yang telah ada dan belum selesai maupun dengan pemerintah Provinsi atau kabupaten lain yang membutuhkan ternak untuk perkembangan daerahnya.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Kinerja pada sasaran 1 Besarnya Pendapatan Asli Daerah ini adalah 97,50% jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangan yaitu 99,97% dibawah capaian program sehingga tidak ada menggambarkan efisiensi penggunaan anggaran.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pendapatan petani peternak. Adapun indicator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat tabel diatas yaitu Besarnya pendapatan Asli Daerah.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 675.449.700,- realisasi sebesar Rp. 675.310.000,- atau 99,97% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana



pasar produksi hasil peternakan, promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah, dan peningkatan pengelolaan dan pemasaran produk hasil peternakan.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah baik, namun masih sangat perlu ditingkatkan untuk menghasilkan capaian yang optimal. Permasalahan dilapangan antara lain adalah pola pemeliharaan masih tradisional dan merupakan usaha sampingan, serta kemampuan dan keterampilan peternak masih rendah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Populasi ternak dan hasil peternakan

a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 2*

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Populasi Ternak dan Hasil Peternakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Populasi ternak dan hasil peternakan	Jumlah Populasi Sapi	407.006	422.059	103,69
		Jumlah Populasi Kerbau	3.860	5.958	154,35
		Jumlah Populasi Kuda	12.117	12.820	105,80
		Jumlah Populasi Kambing	35.240	35.693	101,28
		Jumlah Populasi Ayam Buras	4.947.108	4.976.263	100,58
		Jumlah Populasi Ayam Pedaging	575.460	1.606.452	279,15
		Jumlah Populasi Ayam Petelur	221.623	253.059	114,18
		Jumlah Populasi Itik	300.203	260.409	86,74

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada :



indikator kinerja utama 2 yaitu Jumlah Populasi Sapi, dengan capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 422.059 ekor dari target 407.006 ekor dengan persentase 103,69% Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

indikator kinerja utama 3 yaitu Jumlah Populasi Kerbau, dengan capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 5.958 ekor dari target 3.860 ekor dengan persentase 154,35%. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

indikator kinerja utama 4 yaitu Jumlah Populasi Kuda, dengan capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 12.820 ekor dari target 12.117 ekor dengan persentase 105,80% Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

indikator kinerja utama 5 yaitu Jumlah Populasi Kambing, dengan capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 35.693 ekor dari target 35.240 ekor dengan persentase 101,28% Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

indikator kinerja utama 6 yaitu Jumlah Populasi Ayam Buras, dengan capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 4.976.263 ekor dari target 4.947.108 ekor dengan persentase 101,28% Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

indikator kinerja utama 7 yaitu Jumlah Populasi Ayam Pedaging, dengan capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 1.606.452 ekor dari target 575.460 ekor dengan persentase 279,15% Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

indikator kinerja utama 8 yaitu Jumlah Populasi Ayam Petelur, dengan capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 253.059 ekor dari target 221.623 ekor dengan persentase 279,15% Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

indikator kinerja utama 9 yaitu Jumlah Populasi Itik, dengan capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 260.409 ekor dari target 300.203 ekor dengan persentase 86,74% Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2

Tabel 3.8 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 1 Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Populasi Sapi	395.303	419.819	422.059

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi ternak sapi pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 0,53%, jika di bandingkan dengan tahun 2017, dan tahun 2017 juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,20% dibanding Tahun 2016.

Tabel 3.9 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 2 Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Populasi Kerbau	4.198	4.505	5.958

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi ternak kerbau pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 32,25%, jika di bandingkan tahun sebelumnya, dan pertumbuhan ini sangat signifikan jika dibanding dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 7,31% dibanding Tahun 2016.

Tabel 3.10 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 3 Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Populasi Kuda	10.039	10.659	12.820



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi ternak kuda pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 20,27%, jika di bandingkan tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2017 yang hanya tumbuh sebesar 6,17% dibanding Tahun 2016.

Tabel 3.11 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 4 Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Populasi Kambing	26.501	30.279	35.693

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi ternak kambing pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 17,88%, jika di bandingkan dengan realisasi tahun 2017, sedangkan tahun 2017 hanya tumbuh sebesar 14,25% dibanding Tahun 2016.

Tabel 3.12 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 5 Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Populasi Ayam Buras	3.797.188	4.474.130	4.976.263

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi ternak Ayam Buras pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 11,22%, jika di bandingkan dengan tahun 2017, sedangkan tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 17,82% dibanding Tahun 2016.



Tabel 3.13 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 6 Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Populasi Ayam Pedaging			

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi Ayam Pedaging pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 15,32%, jika di bandingkan dengan tahun 2017, sedangkan tahun 2017 hanya tumbuh sebesar 14,37% dibanding Tahun 2016.

Tabel 3.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 7 Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Populasi Ayam Petelur	193.250	250.910	253.059

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi Ayam Petelur pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 0,85%, jika di bandingkan dengan tahun 2017, sedangkan tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 29,83% dibanding Tahun 2016.

Tabel 3.15 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 8 Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Populasi Itik	233.192	257.420	260.409

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi itik pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 1,16%, jika di



bandingkan dengan tahun 2017, sedangkan di tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 10,38% dibanding Tahun 2016.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target akhir renstra

Capaian tahun 2018 merupakan capaian akhir renstra, sehingga perbandingan menggambarkan pada capaian tahun ini.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 antara jumlah populasi ternak kabupaten bone dengan jumlah populasi Nasional Kabupaten Bone adalah :

- Jumlah Populasi Ternak Sapi Kabupaten Bone mencapai 2,47% dari jumlah populasi ternak sapi nasional sebesar 17.050.006 ekor.
- Jumlah Populasi Ternak Kerbau Kabupaten Bone mencapai 0,37% dari jumlah populasi ternak kerbau nasional sebesar 16.000.000 ekor.
- Jumlah Populasi Ternak Kuda Kabupaten Bone mencapai 3,04% dari jumlah populasi ternak kuda nasional sebesar 421.109 ekor.
- Jumlah Populasi Ternak Kambing Kabupaten Bone mencapai 2,47% dari jumlah populasi ternak kambing nasional sebesar 17.050.006 ekor.

e. Analisis *Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.*

1. Selain pada indikator utama 1, semua indikator utama mengalami keberhasilan/ peningkatan yang disebabkan antara lain :
 - Tingginya jumlah rumah tangga peternak yang berperan serta dalam meningkatkan produksi dan produktifitas ternak khususnya sapi.
 - Ketersediaan lahan untuk usaha peternakan masih tinggi.
 - Adanya pembinaan petani dan Pelaku usaha peternakan.
 -



f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.18. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1	Jumlah Populasi Sapi	103,69	99,68	31.04
2	Jumlah Populasi Kerbau	154,35		
3	Jumlah Populasi Kuda	105,80		
4	Jumlah Populasi Kambing	101,28		
5	Jumlah Populasi Ayam Buras	100,58		
6	Jumlah Populasi Ayam Pedaging	279,15		
7	Jumlah Populasi Ayam Petelur	114,18		
8	Jumlah Populasi Itik	86,74		
	Rata-rata capaian Kinerja	130.72		

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 130.72%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,68% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 2 adalah 31,04%.

g. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan produksi hasil peternakan. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan populasi ternak. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu jumlah populasi ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam petelur, dan ayam pedaging yang dengan capaian sebesar 130,72%.



Capaian program ini tak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 1.611.198.850,- realisasi sebesar Rp.1.597.003.750,- atau 99,11% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah pembibitan dan perawatan ternak, pengembangan agribisnis peternakan dan peningkatan sarana dan prasarana inseminasi buatan.

h. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 2 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain menurunnya mutu genetik ternak, khususnya sapi akibat perkawinan sedarah, produktifitas ternak masih rendah akibat kelemahan manajemen, penerapan teknologi belum mandiri, pemotongan betina produktif masih tinggi sehingga masih perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan.



3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Penerimaan

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Retribusi Tempat Pelelangan | : | Rp. 1.097.035.000,00 (99,73%) |
| 2. Retribusi Rumah Potong Hewan | : | Rp. 121.720.000,00 (81,14%) |

Jumlah	Rp. 1.218.755.000,00-	(97,50%)
--------	-----------------------	----------

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 8.029.104.274,00 (95,76%)

1. Anggaran Kinerja :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Belanja Tidak Langsung | Rp. 2.971.370.798,00 (91,87%) |
| - Belanja Langsung | Rp. 5.057.733.476,00 (98,20%) |

Jumlah	Rp. 8.029.104.274,00
(95,76%)	

3. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja SKPD Dinas Peternakan terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Peternakan dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.971.370.798,00 (91,87%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.772.867.397,00
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 198.503.401,00
Insentif Pungutan Retribusi daerah	Rp 00

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.057.733.476,00 (98,20%) dengan jumlah 7 program dan 24 kegiatan.



4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Peternakan Tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menurunnya mutu genetik ternak, khususnya sapi, akibat perkawinan sedarah.
2. Produktivitas ternak masih rendah akibat kelemahan manajemen.
3. Penetapan teknologi belum mandiri.
4. Pemotongan Betina Produktif masih tinggi.
5. Pola pemeliharaan masih tradisional dan merupakan usaha sampingan.
6. Kemampuan dan keterampilan peternak masih rendah.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Dinas Peternakan.
2. Meningkatkan kualitas SDM peternak dalam teknik budidaya melalui pelatihan dan pembinaan.
3. Meningkatkan penerapan teknologi penerapan dalam pemanfaatan hasil ikutannya.
4. Meningkatkan populasi ternak dan hasil peternakan melalui penerapan inseminasi buatan, pengembangan hijauan makanan ternak, menekan pemotongan betina produktif dan mengatasi kelangkaan pejantan.
5. Menekan munculnya kasus penyakit zoonosis melalui pencegahan dengan vaksinasi dan pengobatan ternak.
6. Meningkatkan pemasaran hewan ternak dan hasil ikutannya melalui promosi.
7. Menyusun perencanaan berbasis masyarakat serta memanfaatkan data masyarakat, aktifitasnya dan peran sertanya sebagai bahan untuk mengambil kebijakan.



BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Peternakan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Peternakan pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 7 (tujuh) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 2 (dua) indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Peternakan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Peternakan ke depan.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Peternakan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.



Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Peternakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.



Lampiran-lampiran :

Isi dengan penghargaan yang diterima pada tahun 2018 jika ada
Isi dengan MOU pada tahun 2018 jika ada

Cascading

NO	SASARAN KABUPATEN	INDIKATOR KABUPATEN	SASARAN SKPD	INDIKATOR SKPD	PROGRAM	KEGIATAN

